



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

APHR Mengeluhkan Kelambatan Yangon, Perlu mekanisme ASEAN soal Rohingya

JAKARTA, 20 Desember 2016 – Anggota parlemen Asia Tenggara hari ini mengungkapkan kekecewaannya pada hasil pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Yangon terkait krisis di Rakhine State, Myanmar.

Meskipun mengakui perkembangan positif dari pertemuan mendadak Menlu-Menlu ASEAN didorong kekhawatiran regional yang sangat kritis dan sensitif, Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mengatakan sangat disayangkan bahwa pertemuan berakhir tanpa komitmen kuat untuk tindakan yg konkrit. APHR menyerukan respon regional yang lebih kuat dan mendesak pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk mematuhi kewajiban mereka sebagaimana dalam Piagam ASEAN untuk melindungi hak asasi manusia.

"Melalui kelambanan berkepanjangan ini, ASEAN terancam gagal menangani krisis Rohingnya. Pertemuan ini seharusnya menjadi kesempatan untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi warga sipil yang rentan dan menyatakan militer pemerintah Myanmar bertanggungjawab atas semua ini. Sayangnya, meskipun sudah dapat diduga sebelumnya, tampaknya itu sebagian besar merupakan tindakan teater politik," kata Ketua APHR, Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia.

"Sayangnya, para menteri luar negeri ASEAN menyerah dengan kata manis dari Aung San Suu Kyi dan tampaknya telah menempatkan isu Rohingnya sebagai isu yang tidak terlalu penting. Itu berita buruk bagi puluhan ribu Rohingnya masih terjebak tanpa akses bantuan di negara bagian Rakhine, dan itu berita buruk untuk ASEAN, yang pada akhirnya akan membayar harga untuk ketidakmampuan atau keengganan Myanmar untuk benar-benar mengatasi situasi tersebut. Intinya adalah bahwa bukti dan sejumlah laporan pelanggaran sampai ke para pihak yang sengaja tidak mau mendengar. "

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Counsellor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, yang berakhir pada hari Senin tanpa komitmen yang jelas dari pemerintah Myanmar diluar janji untuk terus memberikan informasi perkembangan terkini tentang kondisi di negara bagian Rakhine kepada para mitra ASEAN. Para menteri luar negeri ASEAN menawarkan bantuan kemanusiaan tetapi sebagian besar kemudian malah menjauh dari mempertanyakan tindakan pemerintah Myanmar dalam konteks krisis.

Satu pengecualian adalah Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman. Dalam komentarnya selama pertemuan, yang juga dihadiri oleh pers, ia menyatakan "keprihatinan mendalam" atas "laporan dari berbagai sumber menyatakan penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum termasuk anak-anak, pemerkosaan oleh tentara, membakar desa Rohingya serta perusakan rumah dan tempat-tempat ibadah." Ia menyebutnya krisis

pengungsi regional 2015 , ia juga menyatakan bahwa situasi Rohingya jelas merupakan" kekhawatiran regional. " Dia menyerukan akses kemanusiaan langsung ke negara bagian Rakhine, serta untuk ASEAN untuk membentuk sebuah kelompok independen terdiri dari pakar-pakar untuk menyelidiki situasi di sana.

Eva Sundari, di lain pihak mengapresiasi tindakan cepat Menlu Retno yang segera mengkontak Suu Kyi sesaat setelah pecah insiden penyerangan militer di komunitas Rohingya. Hanya sayang, di pertemuan para Menlu minggu lalu, Indonesia memilih cara senyap unt menekan Myanmar. "Hanya mekanisme regional yang bisa mengatasi keengganan Yangon bertindak kongkrit krn jelas mrk mengabaikan desakan cara terbuka Malaysia maupun cara senyap Indonesia" ujar Eva Sundari

"Hal itu menggembirakan mendengar bahwa Menteri Malaysia menekankan dugaan pelanggaran dan mengangkat prospek sebuah investigasi tim ASEAN terdiri dari ahli independen. Namun tampaknya panggilan ini juga lalu begitu saja di pihak-pihak di Yangon. Itu disayangkan karena penyelidikan tersebut, jika benar-benar independen, akan memberikan kontribusi untuk mengungkapkan kebenaran dan memastikan bahwa pelanggaran tidak dapat memperoleh impunitas, "kata Santiago.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, pemerintah Myanmar mengungkapkan "kesiapan untuk memberikan akses kemanusiaan yang diperlukan," tetapi gagal untuk menguraikan rencana detail untuk melakukannya setelah berminggu-minggu dari janji yang sama untuk menyingkirkan hambatan pada bantuan kepada puluhan ribu warga Rakhine State. Pernyataan pemerintah juga menekankan perlunya "waktu dan ruang" untuk mengatasi situasi.

"Hal ini amat mengecewakan melihat Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya dipuja sebagai ikon demokrasi, duduk di hadapan para mitra ASEAN dan memohon untuk 'ruang dan waktu.' Masyarakat sipil Rohingya menghadapi beban serangan di wilayah utara negara bagian Rakhine dan tidak memiliki kemewahan ruang dan waktu," Ujar Walden Bello, seorang Anggota APHR dan mantan Anggota Kongres dari Filipina.

"Tentu saja ada masalah jangka panjang yang amat kompleks untuk diselesaikan di negara bagian Rakhine. Tapi itu kompleksitas tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk memungkinkan terjadinya pembantaian yang amat masif dan kekerasan terhadap warga sipil. Apa yang orang-orang ini butuhkan sekarang adalah perlindungan. Para pimpinan ASEAN harus maju dan tidak bersembunyi di balik basa-basi diplomatik yang biasa dilakukan di ASEAN. "